

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



KONSEP PENGEMBANGAN LOGISTIK DAN SUPPLY
CHAIN UNTUK STRATEGI KETAHANAN PANGAN
KOTA MAKASSAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR KERJASAMA
DENGAN
PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	4
1.3 Manfaat Penelitian	4
1.4 Pemasalahan	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1. Definisi Logistik	8
2.1.2. Definisi Supply Chain	8
2.1.3. Analisis Penggerak Supply Chain	9
2.1.4. Definisi Ketahanan Pangan	10
2.1.5. Aspek Pemasaran	12
2.2 Penelitian Terdahulu	14
BAB III. METODE PENELITIAN	15
3.1 Desain Penelitian	15
3.2 Populasi dan Sampel	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data	16
3.4 Teknik Analisa Data	17
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Analisis Data	25
4.1.1. Gambaran Umum Kawasan Maminasata	25

4.1.2. Aspek Demografi Kawasan Mamminasata	28
4.1.3. Analisis Shift-Share Kawasan Metropolitan Mamminasata ...	30
4.1.4. Analisis Location Quotient	43
4.2 Rumusan Masalah	45
4.2.1. Ketahanan Pangan Kota Makassar	45
4.2.2. Jalur Distribusi pangan ke Kota Makassar	47
4.2.3. Strategi Supply Chain dan Logistik Pangan Daerah Sekitar Sebagai Supplier Pangan Utama ke Kota Makassar	52
4.3 Implikasi Hasil Penelitian	58
 BAB V. PENUTUP	 64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
 DAFTAR PUSTAKA	 66

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Potensi pangan Kota Makassar berdasarkan lingkup Kota Makassar dan kota/kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah belakang Kota Makassar dinyatakan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa komoditas pangan merupakan komoditas utama dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan ketahanan pangan serta pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Misi 2 di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu Tujuan pada Misi 2 adalah meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, sasarannya adalah meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional, meningkatnya kapasitas penyuluhan pertanian, dan meningkatnya ketahanan pangan masyarakat.

Sektor pangan dan pertanian sub sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan dengan kebijakan peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dengan indikator sasaran meningkatkan Produksi Padi mencapai 6.739.078 ton dan Produktivitas Padi 56,56 Kwi/ha serta Meningkatkan Produksi Jagung sebesar 1.712.886 ton (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018).

Kota Makassar dengan daerah belakangnya yaitu kabupaten penghasil pangan utama di Sulawesi Selatan, merupakan penghasil komoditas utama yang memasok kebutuhan pangan ke wilayah Makassar. Berdasarkan Perpres no. 25/2012, peran Makassar dalam sistem logistik nasional ditandai dengan pentingnya pembangunan pusat distribusi regional Makassar untuk mendukung pembangunan Koridor Ekonomi Sulawesi Selatan, terutama untuk produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Pusat distribusi di Makassar akan berpotensi strategis dalam mendukung perdagangan baik pasar domestik, regional maupun global.

Tantangan yang dihadapi Kota Makasar adalah masih terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik dan masih terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.

Salah satu peluang dalam kondisi ekonomi global yang mengalami penurunan adalah peluang untuk meningkatkan kinerja kerja sama perdagangan antardaerah.

Akan tetapi, persaingan antar regional dapat bergeser dari persaingan antar produk dan perusahaan menjadi persaingan antar jaringan logistik dan rantai pasok. Oleh karena itu, efisiensi dalam hal transportasi logistik dan supply chain, serta kemudahan akses agar menciptakan layanan angkutan barang yang optimal dan tepat waktu menjadi faktor penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif dari perdagangan regional Kota Makasar.

Pada dasarnya, jenis *typology* jaringan *partnership* yang dibentuk serta pilihan-pilihan model bisnis yang dipilih, akan tergantung kepada jenis karakteristik komoditasnya. Komoditas dibedakan menjadi komoditas *perishable*, *differentiated or branded product*, dan *bulk commodity*. Karakteristik konsumen di hilir juga menentukan (*branded retailer* atau *wholesaler*, dll) yang pada akhirnya menentukan sifat hubungan saling ketergantungan di antara rantai aktor atau pelaku bisnis. Dalam penelitian ini, lingkup komoditas yang dikaji adalah komoditas pangan yang bersifat *perishable*. Jaringan kemitraan yang bersifat kolaboratif sangat penting untuk pengembangan bisnis komoditas yang bersifat *perishable*. Komoditas pangan tersebut antara lain produk daging, produk ikan, sayuran mayur dan buah-buahan. Hal ini karena dalam masa Teknologi Informasi saat ini, para produsen, pengolah, dan sektor ritel di sektor komoditas pangan tidak akan berkompetisi sebagai entitas-entitas individu, tetapi akan membangun kolaboratif sebagai strategi peningkatan nilai tambah dan strategi menghadapi kompetisi dengan rantai *value* lainnya di dalam sistem pasar. Dalam konteks kolaboratif tersebut, terdapat proses *co-investment* ataupun

sharing ilmu pengetahuan di antara produser, supplier, pengolah, retailer, yang juga tergabung dalam sejumlah jaringan supply yang terseleksi atau terpilih. Para petani-petani skala kecil bergabung dan berkompetisi sebagai satu entitas supplier di mana pengguna produk mereka adalah juga kalangan-kalangan yang berfihak pada sistem produksi dengan kepemilikan bisnis skala kecil.

Konsep city logistics adalah suatu konsep yang menawarkan model untuk mengurangi biaya produksi, memperpendek rute, di mana di dalamnya terdapat kerjasama sistem transportasi pengangkutan, terminal logistik terpusat, pengontrolan faktor loading kendaraan, untuk mencapai efisiensi logistik, memperluas potensi pasar, meningkatkan akses informasi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dalam sistem distribusi pangan, aktivitas logistik yang masih terfragmentasi dan tidak efisien dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan produk. Levi, et.al (2000) mendefinisikan Supply Chain Management (Manajemen Rantai Pasokan) sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Artinya barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, dan pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai suatu biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai service level yang diinginkan.

Mengacu pada konsep tersebut, maka cakupan lokasi penelitian yang diambil adalah area Kawasan Metropolitan Mamminasata (Makassar-Gowa-Maros-Takalar). Meskipun Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, namun beberapa wilayah administratif kecamatan di lokasi tersebut masih memiliki lahan pertanian produktif seluas 247.506,387 Ha dan mampu menopang kebutuhan pangan hingga ke Kota Makassar. Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan penelitian mengenai Konsep Pengembangan Logistik dan Supply Chain untuk Strategi Ketahanan Pangan di Kota Makassar.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kecenderungan pertumbuhan struktur perekonomian di Kawasan Metropolitan Mamminasata.
2. Menganalisis potensi wilayah basis produksi pangan di Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok ke Kota Makassar.
3. Menganalisis pola distribusi komoditas unggulan di tiap Kabupaten Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok pangan di Kota Makassar berdasarkan aspek kandungan lokasi dan tingkat pertumbuhannya dalam menghasilkan komoditas pangan.
4. Menyusun strategi supply chain dan logistic produksi pangan daerah sekitar sebagai supplier pangan utama ke Kota Makassar.
5. Merumuskan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam optimalisasi pasar domestik.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, dibagi ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Memberikan manfaat bagi pengembangan studi spasial perkotaan dan teori pengembangan ilmu perkotaan dalam perspektif ilmu ketahanan pangan, sebagai aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pembangunan kota Metropolitan di Indonesia.
 - b. Menambah hasil penelitian untuk kajian ilmu perencanaan wilayah dan kota, dan secara khusus terkait dengan ketahanan pangan kota Metropolitan.

2. Aspek Guna Laksana

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah bagaimana memahami keberhasilan lahan pertanian produktif pada kawasan perkotaan beserta konsekuensinya.
- b. Memberikan gambaran prediksi pada setiap kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, berkenaan dengan ketahanan pangan pada kawasan kota Metropolitan.
- c. Mengembangkan pendekatan yang mengakomodasi karakteristik ekonomi dan sosiokultural komunitas perkotaan untuk menyelaraskan perkembangan fisik spesial kota Metropolitan diseti sisi dan non fisik disisi lain.
- d. Kontribusi penelitian ini menjadi dasar bagi peneliti berikutnya terkait dengan proses membangun ketahanan pangan kota metropolitan untuk kasus yang berbeda.

1.4. Pernyataan Masalah

Pernyataan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana arah kecenderungan pertumbuhan struktur perekonomian di Kawasan Metropolitan Mamminasata.
2. Bagaimana potensi wilayah basis produksi pangan di Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok ke Kota Makassar.
3. Bagaimana pola distribusi komoditas unggulan di tiap Kabupaten Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok pangan di Kota Makassar berdasarkan aspek kandungan lokasi dan tingkat pertumbuhannya dalam menghasilkan komoditas pangan.
4. Bagaimana strategi supply chain dan logistic produksi pangan daerah sekitar sebagai supplier pangan utama ke Kota Makassar.
5. Bagaimana rumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam optimalisasi pasar domestik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan dari penelitian ini, maka berikut ini diuraikan secara garis besar.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau acuan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, terutama teori- teori yang menjelaskan logistik, supply chain yang dan strategi pemasaran antardaerah daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menggambarkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup tentang desain penelitian, populasi dan sampel, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis arah kecenderungan pertumbuhan struktur perekonomian di Kawasan Metropolitan Mamminasata, potensi wilayah basis produksi pangan di Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok ke Kota Makassar. Menganalisis pola distribusi komoditas unggulan di tiap Kabupaten Kawasan Metropolitan Mamminasata sebagai pemasok pangan di Kota Makassar berdasarkan aspek kandungan lokasi dan tingkat pertumbuhannya dalam menghasilkan komoditas pangan.

menyusun strategi supply chain dan logistic produksi pangan daerah sekitar sebagai supplier pangan utama ke Kota Makassar, dan merumuskan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam optimalisasi pasar domestik.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran pada tahap awal pembahasan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori.

2.1.1. Definisi Logistik

The Council of Logistic Management (1998) mendefinisikan Manajemen Logistik merupakan bagian dari proses Supply Chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (*point of origin*) hingga titik konsumsi (*point of consumption*) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Sehubungan dengan pertanian dan sistem pangan, logistik mencakup perencanaan produksi dan pergerakan produk makanan dari produsen ke konsumen, termasuk pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan. Pembahasan ini secara luas mendefinisikan ruang lingkup logistik yang mencakup aspek transportasi, pergudangan, dan manajemen inventarisasi (Mittal dkk, 2018).

Dalam pengembangan model bisnis berbasis logistik, komponen bisnis dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, factor-faktor internal, serta kombinasi antara factor internal dan eksternal (Kindström, 2005 dalam Sandberg, 2011). Dalam struktur secara keseluruhan, model bisnis berbasis logistik akan berorientasi *flow* (*flow oriented*), di mana berjalannya model bisnis logistik akan dikaitkan dengan karakteristik masing-masing komponen.

2.1.2. Definisi Supply Chain

Menurut Zhou dan Benton (2007), sebuah supply chain merupakan sistem terintegrasi. Sebagai sebuah sistem, sudut pandang analisis terhadap supply chain harus menyeluruh. Seluruh komponen

sistem harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketimpangan pada salah satu komponen akan mengganggu sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan dari sebuah studi maupun analisis sebuah supply chain adalah peningkatan yang proporsional secara menyeluruh pada seluruh entitas mulai dari hulu hingga hilir.

Supply Chain Management (SCM) yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ortiz et al. (2008) mendefinisikan pengembangan berkelanjutan sebagai peningkatan kualitas hidup sehingga memungkinkan manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya.

Konsep *city logistic* adalah suatu konsep yang menawarkan model untuk mengurangi biaya produksi, memperpendek rute, di mana di dalamnya terdapat kerjasama sistem transportasi pengangkutan, terminal logistik terpusat, pengontrolan *factor loading* kendaraan, untuk mencapai efisiensi logistik, memperluas potensi pasar, meningkatkan akses informasi, sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Dalam sistem distribusi pangan, aktivitas logistik yang masih terfragmentasi dan tidak efisien dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan produk.

2.1.3. Analisis Penggerak Supply Chain

Supply chain memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu sendiri. Menurut Chopra dan Meindl (2004) penggerak supply chain adalah sebagai berikut:

a. Inventory

Adalah semua bahan mentah, dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. Inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang penting karena perubahan kebijakan inventory dapat mengubah secara drastis tingkat responsivitas dan efisiensi supply chain. Komponen dari keputusan mengenai

inventory adalah (Chopra dan Meindl, 2004):

b. Cycle inventory

Cycle inventory adalah jumlah rata-rata dari inventory yang digunakan untuk memenuhi permintaan dalam suatu waktu.

c. Safety inventory

Safety inventory adalah inventory yang dibuat untuk berjaga-jaga terhadap perkiraan akan kelebihan permintaan. Ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian atas permintaan yang tinggi.

d. Seasonal inventory

Seasonal inventory adalah inventory yang dibuat untuk mengatasi keragaman yang dapat diprediksi dalam permintaan. Perusahaan yang menggunakan seasonal inventory akan membangun persediaan mereka pada periode permintaan barang rendah dan menyimpannya untuk periode permintaan barang menjadi tinggi, dimana pada saat permintaan tinggi mereka tidak dapat memproduksi semua barang untuk memenuhi permintaan.

2.1.4. Definisi Ketahanan Pangan

Menurut PP No. 88 tahun 2002, ketahanan pangan pada tingkat nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Sementara itu, ketahanan pangan secara mikro dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Sistem ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem utama yaitu ketersediaan, akses, dan penyerapan pangan (Hanani, 2000). Ketersediaan pangan harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat (Suryana, 2003). Sedangkan akses pangan adalah

kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Akses pangan meliputi akses ekonomi, fisik, dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan. Sedangkan penyerapan pangan adalah penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Efektivitas dari penyerapan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas dan layanan kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita (Hanani, 2009). Penyerapan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (DKP, 2009).

Tolok ukur suatu daerah mampu mencapai ketahanan pangan tidak hanya dilihat dari faktor ketersediaan pangan saja, melainkan juga oleh faktor akses dan penyerapan pangan di daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep ketahanan pangan dari berbagai lembaga dunia (Hanani, 2009) seperti: (1) USAID: Kondisi ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh kebutuhan konsumsinya untuk hidup sehat dan produktif. (2) FAO: Situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya. (3) Mercy Corps: Keadaan ketika semua orang pada setiap saat mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap kecukupan pangan, aman, dan bergizi untuk kebutuhan gizi sesuai dengan selera untuk hidup produktif dan sehat.

2.1.5. Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan tindakan-tindakan yang menyebabkan berpindahnya hak milik atau benda-benda dan jasa yang menumbuhkan distribusi fisik (Winardi, 1991). Dikatakan oleh Sudiyono (2002) bahwa pemasaran pertanian termasuk komoditas pangan olahan adalah proses aliran komoditi yang disertai perpindahan hak milik dan penciptaan guna waktu, tempat dan bentuk yang dilakukan oleh lembaga pemasaran dengan melaksanakan satu atau lebih fungsi pemasaran.

Kompleksitas permasalahan pemasaran komoditas pertanian menuntut adanya suatu pendekatan (approach). Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu masalah dari satu sisi sudut pandang tertentu, sehingga masalah menjadi jelas dan mudah untuk diselesaikan (Sudiyono, 2002).

Selanjutnya dikatakan bahwa ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempelajari sistem pemasaran yaitu pendekatan komoditi, pendekatan lembaga, pendekatan fungsi, pendekatan ekonomi dan pendekatan sistem.

Pendekatan komoditi dilakukan dengan menetapkan komoditi yang diteliti dan diikuti aliran komoditi mulai dari produsen sampai konsumen akhir (Sudiyono, 2002). Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah proses penyederhanaan, sehingga hanya dengan menitikberatkan pada suatu komoditi saja kompleksitas pemasaran pertanian dapat disederhanakan.

Pendekatan serba fungsi mempelajari pemasaran dari segi penggolongan kegiatan (jasa) atau fungsi-fungsi (Swastha, 1990). Pendekatan ini dapat digunakan untuk membahas fungsi-fungsi tertentu, seperti pengolahan, jual eceran, transportasi, konsumsi, dll.

Pendekatan lembaga pemasaran mempelajari pemasaran dari segi lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pemasaran (Swastha, 1990). Tujuan lembaga ini adalah untuk mengetahui struktur

yang berdaya guna dan berpengaruh terhadap biaya-biaya yang berkaitan dengan rugi laba.

Pendekatan teori ekonomi menelaah pemasaran pertanian dalam teori ekonomi yang menggunakan konsep-konsep penawaran dan permintaan, pergeseran permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasar. Menurut Manullang (1990) penelaahan pemasaran melalui analisa ekonomi ditujukan untuk menentukan harga dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Pendekatan sistem diterapkan untuk menganalisa sistem pemasaran yang memerlukan pemahaman karakteristik sistem dari yang sederhana sampai yang kompleks yang meliputi:

- 1). Pemasaran merupakan proses ekonomi yang sedang dan berkembang
- 2). Sistem mempunyai pusat kontrol guna mengendalikan aktivitas-aktivitas

Aliran produk dari produsen ke konsumen disertai dengan peningkatan nilai guna. Peningkatan nilai guna ini terwujud hanya apabila terdapat lembaga pemasaran yang melaksanakan fungsi pemasaran atas komoditas tersebut. Fungsi-fungsi pemasaran yang dilaksanakan oleh lembaga pemasaran bermacam-macam yang pada prinsipnya terdapat 3 (tiga) fungsi yaitu: 1) fungsi pertukaran, 2) fungsi fisik dan 3) fungsi penyediaan fasilitas (Sudiyono, 2002).

Fungsi pertukaran dalam pemasaran produk meliputi kegiatan yang menyangkut kegiatan pengalihan pemilikan. Fungsi pertukaran ini terdiri dari fungsi penjualan dan pembelian. Fungsi fisik meliputi pengangkutan dan penyimpanan, sedangkan fungsi penyediaan fasilitas pada hakikatnya adalah untuk memperlancar fungsi pertukaran dan fungsi fisik. Fungsi penyediaan fasilitas merupakan usaha-usaha perbaikan sistem pemasaran untuk meningkatkan efisiensi operasional dan penetapan harga. Fungsi penyediaan fasilitas ini meliputi standarisasi, penanggungan resiko, informasi harga dan penyediaan dana (Sudiyono, 2002).

2.2. Penelitian Terdahulu.

Akhmad mun'im pada 7 desember 2011 mengangkat masalah analisis pengaruh faktor ketersediaan, akses dan penyerapan pangan terhadap ketahanan pangan di kabupaten surplus pangan. Penelitian ini mengidentifikasi sistem dasar supply chain beras, serta menyusun konseptual sistem dan formulasi model supply chain beras untuk pencapaian ketahanan pangan nasional, serta menganalisa perilaku sistem supply chain beras untuk 30 tahun kedepan tetap berkelanjutan dilihat dari aspek pendapatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Nyak Itham, Hermanto Siregar, dan S. Priyansono pada oktober 2006 menganalisa efektivitas kebijakan harga pangan terhadap ketahanan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di tingkat nasional terbukti tidak menjamin akses pangan di tingkat rumah tangga. Sehingga untuk mengefektifkan kebijakan harga pangan perlu didukung oleh kebijakan lain, terutama kebijakan penyediaan infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat, dan membenahi kebooooran-kebooooran dana yang berkaitan dengan program pangan. Nano Prawoto pada september 2012 menganalisa model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dieng di propinsi jawa tengah).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah metode gabungan kualitatif, metode deskriptif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan sebuah penelitian dari hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dengan menjelaskan berdasarkan kata-kata tidak dengan prosedur statistik. Metode ini dapat juga diartikan sebagai usaha mendeskripsikan berbagai fakta dan mengemukakan gejala yang ada untuk kemudian pada tahap berikutnya dapat dilakukan suatu analisis berdasarkan berbagai penilaian yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkret, empiris, obyektif terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari sumber data primer (pokok) dan sumber data sekunder :

- a. Data primer, ialah data pokok yang diterima secara langsung tanpa perantara. Data primer dalam penelitian ini berasal dari data-data langsung hasil observasi
- b. Data lapangan yang dilakukan peneliti di daerah penelitian.
- c. Data sekunder, merupakan jenis sumber data yang diperoleh secara tidak langsung. Sumber data dapat sekunder berasal dari jurnal penelitian, skripsi/tesis, buku, serta internet yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif istilah populasi diganti dengan *spradley* (*social situation*) merupakan suatu kondisi yang dapat dilihat dari segi tempat, pelaku, dan aktivitas yang dilakukan dengan interaksi secara sinergis. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sampel teoritis yang dinamakan partisipan, informan, narasumber, guru dan teman penelitian.

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah para pelaku maupun institusi logistik, supply chain produksi pangan, supplier pangan, aparaturnya pelaksana kebijakan dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data berupa metode-metode pengumpulan data. Menurut Widodo (2019) metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

- a. Metode observasi lapangan yaitu pengumpulan data secara empirik dengan langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kondisi eksisting.
- b. Metode interview/wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung terhadap beberapa orang informan yang dianggap layak memberikan informasi mengenai logistik dan supply chain produksi pangan daerah.
- c. Metode Dokumentasi, merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan memanfaatkan dokumen tertulis, foto, ataupun gambar suatu objek yang berkaitan dengan aspek penelitian.
- d. Metode Telaah Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari, dan atau memahami serta mengambil literatur yang bersumber dari, laporan, buku, jurnal, karya tulis yang relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Analisa Data

Penyusunan strategi supply chain dan logistik komoditas utama dari daerah sekitar untuk melayani ketahanan pangan di Kota Makassar adalah:

- a. Analisis LQ dengan melihat daerah-daerah basis di kabupaten-kabupaten Sulawesi Selatan.
- b. Pemetaan aliran komoditas melalui pengumpulan data komprehensif terdiri dari kuesioner, interview dan observasi, data sekunder dari stakeholder terkait.
- c. Analisis cost-benefit dari masing-masing alur pemasaran regional setiap komoditas dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya tingkat produksi/produktivitas, biaya angkutan, ketersediaan sumberdaya, pola musiman, dll).
- d. Optimasi lokasi, rute, dalam system network, serta kolaborasi dalam system produksi, koleksi dan distribusi, pengelompokan dan integrasi dengan memperhatikan setiap tahapan supply chain yang sensitive terhadap skala ekonomi.
- e. Mengidentifikasi aspek-aspek insitubi untuk mengarahkan intervensi logistik/supply chain yang cost efficient.
- f. Analisis strategi pemasaran dengan memperhatikan klasifikasi kelompok tani, kondisi infrastruktur, konsolidasi anggaran.

Perumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dengan pertimbangan model bisnis (*model supply – demand – impact*) dalam *two tier logistics* melalui kerjasama sector privat, masyarakat petani, dengan pemerintah dalam mengoptimalkan skala pasar domestik di Kota Makassar.

Ketahanan pangan suatu daerah dapat diperoleh dengan mengetahui kondisi potensi daerah tersebut. Adapun langkah analisis sebagai berikut :

1. Analisis Shift dan Share

Digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan wilayah atau sektor dalam suatu daerah. Analisis ini dibedakan menjadi empat komponen. (Budiharsono, 2001), yaitu:

5.1. Pertumbuhan Regional/Kabupaten (PR)

Pertumbuhan Regional (PR) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan komoditas tanaman pangan secara agregat di tingkat kabupaten. Nilai PR positif menunjukkan komoditas tanaman pangan di suatu kabupaten sedang mengalami kemajuan yang berarti, sebaliknya jika bernilai negatif menunjukkan pertumbuhan tanaman pangan di suatu kabupaten sedang mengalami penurunan.

$$PR = \left(\frac{Nt}{Np} - 1 \right)$$

Keterangan:

Nt = Jumlah total produksi komoditas pangan pada tingkat kabupaten pada tahun t (terakhir).

Np = Jumlah total produksi komoditas pangan pada tingkat kabupaten pada tahun p (permulaan).

5.2. Pertumbuhan Proporsional (PPij)

Pertumbuhan proposional digunakan untuk mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan suatu komoditas tanaman pangan di kecamatan dibandingkan dengan komoditas pangan total di kabupaten.

PPij = (% perubahan total produksi, luas panen pada sektor - % perubahan total produksi) X (produksi, luas panen sektor lokal pada t-1) atau

$$PPij = \left[\frac{Nt}{Np} - \frac{Nt}{Np} \right]$$

Keterangan:

N_{ij} = jumlah produksi komoditas i pada tingkat kabupaten pada tahun t (terakhir)

N_{ip} = jumlah produksi komoditas i pada tingkat kabupaten pada tahun p (permulaan)

N_t = jumlah total produksi seluruh komoditas pangan pada tingkat kecamatan pada tahun t (terakhir)

N_p = jumlah total produksi seluruh komoditas pangan pada tingkat kecamatan pada tahun p (permulaan).

Nilai $PPij$ positif menunjukan pertumbuhan komoditas tanaman pangan di tingkat kecamatan termasuk cepat, sedangkan nilai $PPij$ negatif, maka pertumbuhan komoditas pangan di tingkat kecamatan termasuk lambat dibandingkan di kabupaten.

5.3. Pertumbuhan Pangsa Wilayah ($PPWij$)

Pertumbuhan pangsa wilayah digunakan untuk mengukur seberapa besar daya saing suatu komoditas pangan di wilayah (kecamatan) basis dibandingkan dengan komoditas lain di wilayah (kecamatan) yang dijadikan acuan.

$PPWij = (\% \text{ perubahan total produksi, luas panen sektor lokal} - \% \text{ perubahan total produksi, luas panen}) \times (\text{produksi sektor lokal pada } t-1)$.

$$PPWij = \left[\frac{S_{it}}{N_{ip}} - \frac{N_{it}}{N_{ip}} \right]$$

Keterangan:

S_{it} = jumlah produksi komoditas i pada tingkat kecamatan basis pada tahun t (terakhir)

Sip = jumlah produksi komoditas i pada tingkat kecamatan basis pada tahun p (permulaan)

Nit = jumlah produksi komoditas lain pada tingkat kecamatan basis pada tahun t (terakhir)

Nip = jumlah produksi komoditas i pada tingkat kecamatan basis pada tahun p (permulaan)

Nilai PPWij positif menunjukan komoditas pangan i pada tingkat wilayah mempunyai daya saing tinggi dibandingkan pada komoditas yang sama pada wilayah lain.

5.4. Pertumbuhan Bersih

Jumlah PFi_j dan PPWi_j tersebut di atas dinyatakan dengan pertumbuhan bersih (Pbi_j), yang dinyatakan sebagai berikut:

$$Pbi_j = PFi_j + PPWi_j$$

Keterangan:

Pbi_j = pertumbuhan bersih komoditas i pada tingkat wilayah.

Nilai Pbi_j positif menunjukan pertumbuhan komoditas tanaman pangan i pada tingkat wilayah termasuk progresif, sedangkan bila nilai Pbi_j negatif, maka pertumbuhan komoditas pangan i di tingkat wilayah termasuk lambat.

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi komoditas basis dan bukan basis pangan pada suatu daerah. Teknik ini membandingkan antara kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas dengan daerah lain yang merupakan penghasil komoditas yang sama.

Konsep tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut (Warpani, 1984) :

$$LQ = \frac{S_i / N_i}{S/N} = \frac{S_i / S}{N_i / N}$$

Keterangan :

LQ = Besarnya koefisien lokasi komoditas pangan.

S_i = Jumlah (produksi) komoditas i pada tiap kecamatan

S = Jumlah (total produksi) pangan tingkat kecamatan

N_i = Jumlah produksi komoditas i pada tingkat kabupaten.

N = Jumlah total produksi komoditas pangan tingkat kabupaten.

Angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut :

- $LQ > 1$, menunjukan komoditas tersebut termasuk komoditas basis
- $LQ < 1$, menunjukan komoditas tersebut termasuk komoditas non basis
- $LQ = 1$, menunjukan komoditas tersebut tersebut hanya dapat mencukupi wilayah itu sendiri

3. Analisis Tumpang Susun Lahan Superimpose)

Melalui analisis gabungan dari hasil-hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya (analisis LQ, pertumbuhan proporsional, pertumbuhan pangsa wilayah, pertumbuhan bersih) di gabung untuk mengetahui keunggulan dari komoditas yang sedang dianalisis. Komoditas yang sangat unggul akan memiliki nilai gabungan yang paling tinggi.

4. Analisis Kinerja Pelayanan Sistem Transportasi Kota Makassar

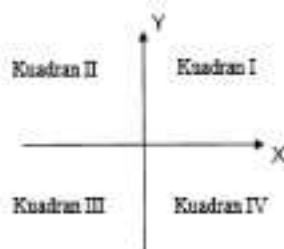
Untuk menetapkan nilai kinerja pelayanan sistem transportasi digunakan pendekatan Nilai Kinerja melalui metode *Customer Satisfaction Index (CSI)* yaitu membandingkan antara nilai kepuasan (X_1) dan nilai kepentingan pemakai jasa transportasi (Y_1). Nilai X_1 dan Y_1 berdasarkan penilaian responden (para ahli).

Kinerja Pelayanan pemakai jasa transportasi dibagi atas 7 (tujuh) tingkatan yaitu:

- Jika $X \leq 64\%$ = Very poor
- $64 < X \leq 71\%$ = Poor
- $71 < X \leq 77\%$ = Cause for Concern
- $77 < X \leq 80\%$ = Border Line
- $80 < X \leq 84\%$ = Good
- $84 < X \leq 87\%$ = Very Good
- $X > 87\%$ = Excellent

Langkah berikutnya adalah menghitung selisih antara nilai X_1 dan nilai X_1 rata-rata (ΔX_1) dan selisih antara nilai Y_1 dan Nilai Y_1 rata-rata (ΔY_1). X_1 kepuasan dan Y_1 kepentingan didapat dari rata-rata nilai bobot hasil penilaian responden pada 4 zone, sedangkan (ΔX_1) nilai bobot rata-rata terhadap 14 indikator kinerja.

selanjutnya dilakukan pengurangan antara X_1 dan ΔX_1 serta Y_1 dan ΔY_1 akan menghasilkan nilai negatif atau positif yang menjadi dasar penentuan titik koordinat pada pada setiap kuadran. Untuk menunjukkan koordinat hubungan antara tingkat kepuasan dan kepentingan dibuat sumbu kartesius dan selanjutnya dilakukan peletakan nilai koordinat indikator kinerja yang menghasilkan posisi kuadran, seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Kuadran hubungan kepuasan dan kepentingan

Y = Kepentingan X = Kepuasan

- Kuadran I** : menunjukkan indikator yang berada pada kuadran ini mempengaruhi kepuasan pemakai jasa transportasi, sehingga membutuhkan prioritas pelaksanaannya.
- Kuadran II** : menunjukkan indikator yang berada pada kuadran ini perlu dipertahankan pelayanannya karena sudah sesuai yang dibutuhkan pemakai jasa transportasi.
- Kuadran III** : menunjukkan indikator yang berada pada kuadran ini bagi pemakai jasa transportasi belum terlalu penting, namun pelayanannya juga masih terbatas.
- Kuadran IV** : menunjukkan indikator yang berada pada kuadran ini bagi pemakai jasa transportasi dianggap dianggap belum terlalu penting namun pelaksanaannya sangat baik.

5. Analisis Keterkaitan Manajemen Rantai Pasokan dengan Strategi Pengembangan

Keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi akan ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Strategi Rantai Pasok

Analisis	Strategi biaya rendah	Strategi respon	Strategi diferensiasi
Tujuan pemasok	Penuhi permintaan dengan biaya serendah mungkin	Tanggapi perubahan kebutuhan/permintaan dengan cepat untuk meminimalkan terjadinya persediaan habis	Penelitian pangsa pasar, bersama-sama mengembangkan produk dan pilihan
Kriteria pemilihan utama	Pilih terutama karena biaya	Pilih terutama karena kapasitas, kecepatan dan fleksibilitas	Pilih terutama kemampuan pengembangan produk
Karakteristik proses	Mempertahankan utilitas rata-rata yang Tinggi	Menanam modal pada kapasitas berlebih dan proses yang fleksibel	Proses modular yang menuju mass customization
Karakteristik Persediaan	Meminimalkan persediaan di seluruh rantai untuk menekan biaya	Kembangkan sistem yang cepat tanggap, dengan persediaan cadangan untuk memastikan pasokan	Minimalkan persediaan dalam rantai untuk menghindari produk menjadi usang
Karakteristik Lead Time	Memendekkan lead time sepanjang tidak meningkatkan biaya	Menanamkan investasi secara agresif untuk mengurangi lead time produksi	Menanamkan investasi secara agresif untuk mengurangi lead time pengembangan
Karakteristik desain produk	Maksimalkan kinerja dan minimisasi biaya	Menggunakan desain produk yang mendorong waktu set up yang rendah dan produksi massal	Menggunakan desain modular untuk menunda diferensiasi produk selama mungkin.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis Data

4.1.1. Gambaran Umum Kawasan Mamminasata

Kawasan perkotaan perkotaan Metropolitan Mamminasata ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar. Kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata yang ditetapkan tersebut, mencakup 14 (empat belas) wilayah kecamatan (Lihat Gambar 1). Kawasan perkotaan yang dimaksud merupakan satu kesatuan sistem wilayah pengembangan kota Metropolitan Mamminasata, sebagai berikut:

- Seluruh wilayah Kota Makassar, mencakup 15 (lima belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso;
- Seluruh wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara;
- Sebagian wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan Kecamatan Bontonompo Selatan; dan

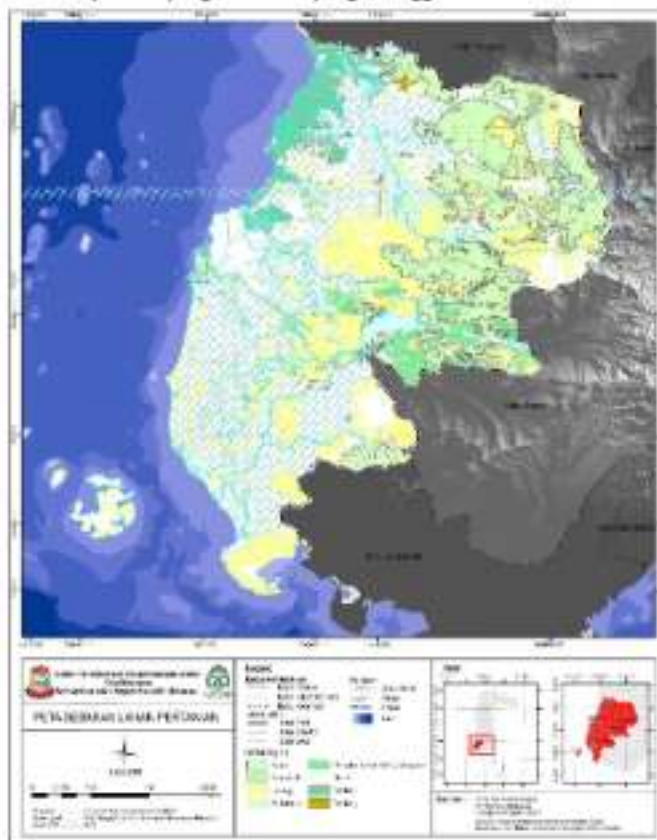
- Sebagian wilayah Kabupaten Maros mencakup 12 (dua belas) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Tunjale, Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Bontos, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanrisili, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan Kecamatan Cennana.



Gambar 1. Kawasan Perkotaan Kota Metropolitan Mamminasata
Sumber: RTRW Metropolitan Mamminasata 2009 dan Modifikasi Penulis, 2020

Mengacu pada penetapan tersebut, maka untuk wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, dalam hal penetapan wilayah pengembangan perkotaan adalah mencakup seluruh wilayah kecamatan yang ada dikategorikan sebagai kawasan perkotaan Metropolitan Mamminasata. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, hanya sebagian wilayah kecamatan yang ditetapkan dalam lingkup kawasan perkotaan yaitu, 11 wilayah kecamatan berlokasi di Kabupaten Gowa dan 12 wilayah kecamatan berlokasi di Kabupaten Maros. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kedudukan Kota

Makassar yang ditetapkan sebagai kota inti, sedangkan Kota Turikale (Kabupaten Maros), Kota Sungguminasa (Kabupaten Gowa), dan Kota Pattalena (Kabupaten Takalar) sebagai kota penunjang. Meskipun Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan, namun beberapa wilayah administratif kecamatan di lokasi tersebut masih memiliki lahan pertanian produktif seluas 247.508,387 Ha dan mampu menopang kebutuhan pangan hingga ke Kota Makassar.



Gambar 2. Sebaran Lahan Pertanian di Kota Metropolitan Mamminasata
Sumber: RTRW Metropolitan Mamminasata 2009 dan Modifikasi Penulis, 2020

4.1.2. Aspek Demografi Kawasan Mamminasata

1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, diperoleh perkembangan penduduk di Lokasi Penelitian pada Tahun 2018 yang mengalami laju pertumbuhan meningkat sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kawasan Mamminasata Tahun 2018

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1.	Kota Makassar	1.526.677	1,14
2.	Kabupaten Gowa	780.607	1,66
3.	Kabupaten Takalar	295.892	0,99
4.	Kabupaten Maros	340.822	0,99
Jumlah		2.932.998	4,78

Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2019

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki jumlah penduduk yang paling tertinggi diantara wilayah lainnya dalam area Kawasan Metropolitan Mamminasata. Jumlah penduduk Makassar adalah 1.526.677 jiwa. Sementara wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang masih rendah dalam area Kawasan Metropolitan Mamminasata adalah Kabupaten Takalar, dengan jumlah penduduk 295.892 jiwa. Keberadaan data penduduk ini dapat menjadi referensi untuk langkah rumusan kebijakan dalam penyaluran pangan di kota ini Makassar.

2. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, untuk distribusi dan kepadatan penduduk menurut kota/kabupaten di Lokasi Penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3 Kepadatan Penduduk per Kabupaten
di Kawasan Mamminasata Tahun 2018

No.	Kota/Kabupaten	Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Kota Makassar	1.526.677	175,77	8.688
2.	Kabupaten Gowa	780.607	1883,32	404
3.	Kabupaten Takalar	285.892	500,51	522
4.	Kabupaten Maros	349.822	1619,12	216
Rata-rata		733.250	4244,72	2.457

Sumber: Provinsi Sulawesi Selatan dalam Angka Tahun 2019

Tabel 3 menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang paling tertinggi diantara wilayah lainnya dalam area Kawasan Metropolitan Mamminasata adalah Kota Makassar, dengan jumlah kepadatan 8.688 Jiwa/Km². Sementara untuk kepadatan penduduk yang paling terendah adalah Kabupaten Maros, yaitu 216 8.688 Jiwa/Km². Keberadaan data kepadatan penduduk ini dapat menjadi referensi untuk langkah rumusan kebijakan dalam penyakuran pangan di kota inti Makassar. Data ini juga menunjukkan bahwa Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar mampu menopang ketahanan pangan di Kota Makassar.

4.3.2. Analisis Shift-Share Kawasan Metropolitan Makassar

Analisis Shift-Share adalah salah satu alat analisis yang dapat digunakan dalam memilah komposisi peranan masing-masing sektor dalam PDRB. Pada penelitian ini, shift-share analysis digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan sektor ekonomi di kabupaten terhadap perekonomian secara regresi dan residual. Nilai KPP positif mengkonfirmasi sektor ekonomi tersebut pesat pertumbuhannya dan KPP bernilai negatif berarti lambat pertumbuhannya. Berikut uraian data pertumbuhan struktur ekonomi di masing-masing wilayah area Kawasan Metropolitan Makassar.

1. Analisis Shift-Share Kota Makassar

Struktur ekonomi Kota Makassar terdiri dari dua lapis besar, sektor dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Makassar. Sementara sektor ekonomi yang paling rendah memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Makassar adalah sektor ekonomi bidang pertanian dan perikanan. Secara keseluruhan masing-masing sektor ekonomi di Kota Makassar diuraikan dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan dan PDRB Sulawesi Selatan

No	Sektor Ekonomi	PDRB Makassar		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	
		2016	2019	2016	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	663,715.00	609,429.97	54,029.19	64,874.40
2	Pertambangan dan Penggalian	1,991.97	1,702.39	19,802.86	19,779.29
3	Industri Pengolahan	22,283,376.53	29,369,566.39	26,547.21	40,798.31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	32,818.97	80,488.88	250.44	292.44

No	sektor ekonomi	PDRB Makassar		PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	
		2015	2016	2015	2016
6	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	282,282.88	307,885.78	302.88	388.87
6	Konstruksi	19,888,307.88	21,790,382.82	28,887.28	378,872.18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor	26,009,471.87	21,762,861.09	24,215.41	47,132.15
8	Transportasi dan Pergudangan	2,888,780.72	4,181,018.78	8,142.88	11,777.88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,871,178.88	3,888,770.88	8,370.08	4,812.02
10	Informasi dan Komunikasi	10,142,002.48	14,801,742.81	18,712.88	21,308.88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,831,388.88	9,708,788.81	8,882.82	10,782.88
12	Retail	4,944,270.20	5,357,040.88	5,197.42	10,895.30
13	Jasa Perumahan	1,388,688.05	1,897,188.13	1,885.33	1,383.87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,226,249.09	6,494,161.12	11,262.12	12,114.24
15	Jasa Pendidikan	10,446,235.40	14,464,268.58	13,378.88	17,217.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,000,320.38	4,403,788.91	4,845.17	6,208.38
17	Jasa Lainnya	2,991,383.30	4,470,285.45	2,207.82	4,366.71
	Total	114,832,108.71	148,207,888.28	280,802.88	680,242.82

SUMBER: BPS - TRIWULAN 2016-2017

Tabel 6 Nilai Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar

No	Sektor Ekonomi	Nilai Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar			
		KPM	KPP	KPN	POK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.057.055,14	-432.855,18	118.255,18	544.713,07
2	Pertambangan dan Pengolahan	2.535,46	-2637,21	1.335,12	(899,89)
3	Industri Pengolahan	37.082.195,82	3.564.9432,60	4.368.919,21	8.087.135,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	81.791,32	-48331,99	7.128,87	17.869,99
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	401.717,98	-3.95324,29	92.488,64	96.662,16
6	Konstruksi	31.152.345,21	136835357,01	225.557.349,42	9.175.025,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	33.301.437,04	-25585279,56	5.768.581,09	10.844.585,58
8	Transportasi dan Perakitan	4.776.005,45	-2911036,00	229.363,12	1.152.225,00
9	Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	4.264.248,89	-5288623,19	428.827,40	1.027.890,74
10	Informasi dan Komunikasi	16.162.629,86	-12721276,60	2.880.467,11	4.669.740,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.860.165,30	-5230385,56	476.713,53	2.875.300,57
12	Retail	7.874.689,89	-7088938,91	1.111.807,83	1.012.782,89
13	Jasa Persewaan	2.166.729,77	-1778427,19	121.797,94	637.327,38

No	Sektor ekonomi	Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar			
		KPM	KPP	KPK	PPK
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,781,083.21	-4076618.11	888,184.99	1,287,812.28
15	Jasa Pendidikan	10,637,185.40	-13630381.72	844,884.66	4,036,030.98
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,524,374.78	-4054536.77	428,832.14	1,351,446.53
17	Jasa Lainnya	4,764,170.18	-2682406.79	786,903.66	1,479,046.96

Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2020

2. Analisis SWOT Kota Kabupaten Gowa

Struktur ekonomi Kabupaten Gowa terdiri dari dari tujuh belas sektor dengan sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan sebagai sektor ekonomi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gowa. Sementara sektor ekonomi yang paling rendah memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Gowa adalah sektor jasa perusahaan. Besaran persentase masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Gowa diuraikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 9 PDR Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Harga Konstan dan FDR Disesuaikan dengan

No	Sektor Ekonomi	PDRM SUMBAWA		PDRM PROVINSI SULAWESI BARAT	
		2016	2019	2016	2019
1	Perikanan, perikanan, dan Perikanan	1,233,668.03	1,708,332.48	62,096.10	62,874.40
2	Perdagangan dan Penggajian	295,061.68	437,582.83	15,802.96	16,778.09
3	Industri Pengolahan	883,808.74	811,134.76	38,637.31	30,769.01
4	Persediaan Listrik dan Gas	16,514.95	24,324.25	230.44	292.44
5	Pemukimian Air, Pemukiman Berpetak, Listrik, dan Darat	14,076.29	17,205.91	302.86	366.97
6	Konstruksi	1,093,062.62	1,290,947.66	29,967.28	279,872.19
7	Persediaan Besar dan Kecil, Rokok, Rokok dan Rokok Motor	1,197,766.19	1,669,945.28	26,916.41	47,132.16
8	Transportasi dan Pergudangan	181,212.01	181,822.81	9,142.66	11,777.86
9	Persediaan Asuransi dan Mekanik Mekanik	347,761.01	829,238.00	8,970.08	4,812.02
10	Informasi dan Komunikasi	1,084,288.69	1,278,403.60	18,712.60	21,328.66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	260,238.90	299,867.77	8,962.69	10,766.89
12	Real estate	779,697.24	962,116.85	9,197.42	10,696.90
13	Jasa Persewaan, Administrasi, Persewaan, Persewaan, Persewaan	12,181.85	15,285.12	1,085.85	1,305.87
14	Perumahan dan Jasa-jasa Lain	670,116.62	682,192.63	11,962.12	13,114.34
15	Jasa Persewaan	488,641.01	594,121.44	13,576.05	17,217.10

No	Sektor ekonomi	PDRD GOWA		PDRD Provinsi Sulawesi Selatan	2018
		2015	2016	2016	
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,982.63	237,893.13	5,899.17	8,208.88
17	Jasa Lainnya	131,822.70	190,837.10	5,207.83	5,898.71
Total		18,228,996.74	12,222,873.73	260,302.88	660,242.82

Sumber: BPS Kabupaten Gowa, Tahun 2015-2018

Tabel 7 Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa

No	Sektor Ekonomi	Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa			
		KPM	KPP	KPK	PKH
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,148,827.88	-182,687.88	787,893.17	210,787.38
2	Pertambangan dan Energi	466,929.10	-401,721.96	23,725.13	122,921.10
3	Industri Pengolahan	1,057,214.55	-555,347.72	148,222.56	147,315.02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	36,124.84	-25035.78	711.51	8,408.30
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	22,818.72	-19,038.00	2,173.08	3,189.82
6	Konstruksi	1,740,954.35	155,523.65	12,378,471.31	257,854.13
7	Pengdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	1,507,618.75	-148,825.50	87,118.48	787,878.19
8	Transportasi dan Komunikasi	246,966.62	-197,272.49	12,749.66	20,210.80

No	Sektor Ekonomi	Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gowa			
		PMP	PMP	PMP	PMP
9	Pelayanan Administrasi dan Makan Minum	961,479.90	-80,5276.83	28.991.11	81,288.98
10	Informasi dan Komunikasi	1,095,051.60	-134,906.60	58,477.24	305,145.35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	382,635.73	-32,459.21	34,937.44	48,415.87
12	Real estate	1,288,844.27	-111,0518.98	147,002.18	188,819.81
13	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	19,801.82	-1,6904.87	641.83	3,281.21
14	Perumahan dan Jaminan Sosial Warga	906,470.57	-829,002.99	198,211.56	61,776.91
16	Jasa Perawatan	718,887.88	-61,2084.28	18,192.81	128,180.44
18	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	304,932.07	-251,063.26	13,410.13	46,190.76
17	Jasa Lainnya	225,398.89	-174,270.92	16,266.26	46,812.43

Sumber: Hasil Analisis Tim Teknis 2020

6. Analisis Grati-Utara Kabupaten Maros

Struktur ekonomi Kabupaten Maros terdiri dari dari tujuh belas sektor dengan sektor horizontal dan perdagangan sebagai sektor ekonomi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Maros. Bersebelahan sektor ekonomi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Maros adalah sektor jasa perusahaan. Besaran persentase masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Maros diuraikan dalam Tabel 6 berikut.

Tabel 8. PDQ Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Konstan dan PDQ Quarterly Season

No.	Sektor Ekonomi	PDQ MERAUKE		PDQ PTONGHE SUKAWATI SEWATI	
		2018	2019	2018	2019
1	Pedanaan, Konsumen, dan Perikanan	1,749,988.44	2,202,311.82	84,088.10	84,874.40
2	Pertambangan dan Penggalian	726,230.96	1,142,652.77	16,892.56	16,778.66
3	Industri Pengolahan	2,337,241.31	2,733,882.18	35,547.21	40,788.01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,881.18	10,809.88	230.00	292.08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Debu	10,807.90	12,171.88	823.88	888.87
6	Konstruksi	873,018.72	788,088.20	28,887.28	378,872.19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparat Motor dan Sepeda Motor	354,448.78	415,031.88	34,518.41	47,132.18
8	Transportasi dan Pengangkutan	3,161,825.82	4,175,954.81	5,142.48	11,777.68
9	Perumahan, Air Bersih dan Pasokan Listrik	34,748.78	41,548.67	3,378.06	4,812.02
10	Informasi dan Komunikasi	143,700.52	168,702.86	12,712.66	21,828.66
11	Seni, Rekreasi dan Akrual	147,007.27	185,505.45	8,562.54	16,754.88
12	Restorasi	180,430.98	178,883.88	9,187.02	10,888.90
12	Jasa Perumahan	2,821.64	3,060.23	1,008.52	1,262.67
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	278,169.84	468,024.00	11,362.12	12,114.28
15	Jasa Pendidikan	178,807.22	198,918.88	18,378.00	19,217.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,551.73	84,100.87	4,845.17	6,208.38
17	Jasa Lain-lain	97,714.28	44,803.81	3,207.83	4,388.71

No.	sektor ekonomi	PDRG MAROS		PDRG Provinsi Sulawesi Selatan	
		2018	2019	2018	2019
	Total	10.999.229.76	12.790.919.41	268.992.08	999.349.62

Sumber: BPS Kabupaten Maros, Tahun 2018-2019

Tabel 9 Nilai Absolut Perkembangan Ekonomi Kabupaten Maros

No	sektor	Nilai Absolut Struktur Ekonomi Kabupaten Maros			
		KPM	KPP	KPK	KPS
1	Perdagangan, Kebutuhan, dan Perikanan	2.787.131.38	2438671.61	(236.295.88)	452.112.48
2	Perdagangan dan Persewaan	1.472.715.35	-360545.15	751.105.52	435.722.51
3	Industri Pengolahan	3.733.400.38	3881835.72	6.415.707.87	998.840.84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16.888.77	12240.68	22.910.00	888.41
5	Pengadaan Air, Pengadaan Sampah, Limbah, dan Daur	17.212.21	18285.07	28.288.88	1.382.18
6	Konstruksi	912.613.36	7244571.40	7.575.665.00	152.881.48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	264.000.66	479454.51	657.496.20	64.585.88
8	Transportasi dan Pergudangan	5.524.404.66	4672154.12	8.245.126.74	1.014.954.78
9	Persewaan Akomodasi dan Makan Minum	88.542.41	47954.88	88.103.22	6.788.97
10	Informasi dan Komunikasi	225.884.28	182515.88	381.005.52	25.001.84
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.180.88	182616.41	382.020.88	22.488.18
12	Kategori Lain	288.888.60	178888.78	382.593.88	28.222.88

No	Sektor	Nilai Absolut Struktur Ekonomi Kabupaten Marek			
		SDPD	SDPP	SDPK	SDPS
13	Jasa Persewaan	5.176.36	3375.76	6.331.62	438.88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	594.325.55	430717.27	663.741.27	79.654.58
15	Jasa Pendidikan	279.505.62	225100.94	415.015.29	19.011.83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111.472.12	89594.21	173.792.88	14.116.94
17	Jasa Lainnya	60.085.41	51536.06	84.943.87	6.886.11

Sumber: Hasil Analisis Tim Takur 2020

4. Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Takur

Struktur ekonomi Kabupaten Takur terdiri dari kish besar sektor dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor ekonomi yang paling tinggi memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Takur. Sementara sektor ekonomi yang paling rendah memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Takur adalah sektor Perdagangan, Akomodasi, Makanan, Minuman, dan Kesehatan. Berdasarkan analisis masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Takur diuraikan dalam Tabel 10 berikut.

Tabel 16 PDRD Kabupaten Takalar Atas Dasar Harga Konstan dan PDR Qulawati Gajian

No	Sektor Ekonomi	PDRD TAKALAR		PDRD PROVINSI SULAWESI SELATAN	
		2015	2018	2018	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.388.141,08	3.121.421,84	84.088,10	84.874,42
2	Pertambangan dan Penggalian	77.144,67	10.264,77	18.802,94	18.779,09
3	Industri Pengolahan	255.513,75	366.566,27	35.547,21	40.788,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.422,87	11.288,8	230,44	292,44
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur	2.149,03	2.262,54	302,86	364,97
6	Konstruksi	342.960,88	456.051,47	25.907,28	376.872,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, Akomodasi dan Sepeda Motor	882.624,88	848.185,88	54.818,41	47.132,18
8	Transportasi dan Pengudangan	148.274,06	229.020,61	9.142,86	11.777,68
9	Persewaan, Akomodasi dan Makan Minum	18.104,18	2.5290,14	9.370,08	4.812,02
10	Informasi dan Komunikasi	794.827,46	214.206,14	16.712,60	21.028,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	62.896,28	84.446,62	9.662,54	10.754,89
12	Retail eceran	297.370,15	386.116,32	5.197,42	10.895,90
13	Jasa Perumahan	334,89	448,88	1.018,83	1.383,87

No	Sektor Ekonomi	KORID TAKALAR		KORID Provinsi Sulawesi Selatan	
		2018	2019	2018	2019
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241,962.02	449946.3	11,262.13	12,114.34
15	Jasa Pendidikan	71,155.86	52026.55	15,376.99	17,217.12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,962.30	72861.8	6,816.17	6,208.88
17	Jasa Lainnya	12,122.48	16656.86	2,207.83	4,266.71
Total		4,881,887.78	6,918,366.78	200,865.99	600,348.92

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, Tahun 2018-2019

Tabel 11 Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar

No	Sektor Ekonomi	Nilai Absolut Struktur Ekonomi Kabupaten Takalar			
		KPM	HPP	HPK	PDH
1	Perdagangan, Kehutanan, dan Perikanan	3,720,640.85	3226242.33	133,548.79	785,260.40
2	Pertambangan dan Energi	122,679.95	-110119.00	14,575.31	16,389.20
3	Industri Pengolahan	470,457.95	-425907.46	60,541.15	76,972.51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,821.85	-9834.45	1,881.51	4,082.88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Sisa	4,376.23	-3756.31	433.77	813.51
6	Konstruksi	648,225.17	848890.98	8,804,942.30	11,8284.88

No	Sektor Ekonomi	Nilai Absolut Struktur Ekonomi Kabupaten Tegal			
		RPM	KPP	KPK	PRK
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Besi-besi Motor	1,044,164.49	-923,004.64	125,638.71	286,667.00
8	Transportasi dan Pengangkutan	235,031.20	-198,180.19	12,818.42	87,988.88
9	Perumahan, Air Bersih dan Makan Minum	25,640.27	-10,713.44	2,516.70	7,129.06
10	Informasi dan Komunikasi	310,291.19	-344,378.05	20,504.07	75,481.70
11	Jasa Keperawatan dan Asuransi	101,700.51	-80,276.67	1,838.05	26,590.34
12	Real estate	279,806.74	-425,157.02	20,846.70	86,740.13
13	Jasa Perawatan	933.04	-628.97	11.08	113.88
14	Administrasi Pemerintahan, Peraturan dan Jaminan Sosial Uang	642,191.40	-450,954.95	40,749.35	109,765.28
15	Jasa Pendidikan	114,287.81	-93,004.75	1,666.16	26,268.93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96,047.01	-82,726.19	8,173.89	10,909.20
17	Jasa Lainnya	19,629.80	-10,009.70	1,755.08	4,506.30

Sumber: Hasil Analisis Tim Tegal 2009

4.1.4. Analisis Location Quotient

1. Kabupaten Takalar

Tabel 12 Jumlah Produksi Bahan Pangan Di Kabupaten Takalar Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018
1	Padi	-	-	117,386,000	134,775,000
2	Jagung	-	-	55,973,000	69,710,000
3	Kedelai	-	-	388,000	210,000
4	Bawang Merah	90,000	49,400	82,600	241,600
	Jumlah	90,000	49,400	173,839,600	204,936,600

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar Tahun 2016-2020

Berikut merupakan hasil dari perhitungan Analisis LQ di Kabupaten Takalar, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 13

Tabel 13 Hasil LQ Bahan Pangan di Kabupaten Takalar Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018	LQ	Ket.
1	Padi	0.00	0.00	0.84	0.91	0.46	NB
2	Jagung	0.00	0.00	1.16	1.25	0.69	NB
3	Kedelai	0.00	0.00	1.17	0.25	0.35	NB
4	Bawang Merah	1007.90	837.18	0.36	1.09	461.63	Basis

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

Dari Tabel 13 diketahui bahwa komoditas basis di Kabupaten Takalar dari sektor pertanian yakni bawang merah.

2. Kabupaten Gowa

Tabel 14 Jumlah Produksi Bahan Pangan Di Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018
1	Padi	382,137,000	401,979,000	-	-
2	Jagung	239,631,000	202,296,000	-	-
3	Kedelai	8,077,000	-	-	-
4	Bawang Merah	501,000	1,562,000	1,828,000	807,000
	Jumlah	630,346,000	665,829,000	1,828,000	807,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2016-2020

Berikut merupakan hasil dari perhitungan Analisis LQ di Kabupaten Gowa, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Hasil LQ Bahan Pangan di Kabupaten Gowa Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018	LQ	Ket.
1	Padi	0.78	0.83	0.00	0.00	0.40	NB
2	Jagung	1.78	1.50	0.00	0.00	0.81	NB
3	Kedelai	1.35	0.00	0.00	0.00	0.34	NB
4	Bawang Merah	0.80	1.95	059.54	923.20	396.39	Basis

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

Dari Tabel 15 diketahui bahwa komoditas basis di Kabupaten Gowa dari sektor pertanian yakni bawang merah.

3. Kabupaten Maros

Tabel 16 Jumlah Produksi Bahan Pangan Di Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018
1	Padi	351,169,000	448,895,000	299,539,000	327,811,000
2	Jagung	5,483,000	69,403,000	21,157,000	48,610,000
3	Kedelai	4,296,000	8,180,000	904,000	1,329,000
4	Bawang Merah	27,000	59,000	59,000	217,000

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Berikut merupakan hasil dari perhitungan Analisis LQ di Kabupaten Maros, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Hasil LQ Bahan Pangan di Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018	LQ	Ket.
1	Padi	1.19	1.12	1.16	1.08	1.14	Basis
2	Jagung	0.07	0.46	0.21	0.42	0.30	NB
3	Kedelai	1.18	1.42	1.32	0.76	1.17	Basis

No.	Produksi Bahan Pangan	2015	2016	2017	2018	LQ	Ket.
4	Bawang Merah	0.07	0.09	0.11	0.48	0.19	NB

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

4. Rekapitulasi Nilai LQ

Tabel 18 Rekapitulasi Nilai LQ Bahan Pangan di Mamminasata

No	Kabupaten	Sektor Basis	Nilai Basis
1	Takalar	Bawang Merah	461.83
2	Gowa	Bawang Merah	398.30
3	Maros	Padi	1.14
		Kedelai	1.17

Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang menjadi basis pemasok pangan ke Kota Makassar dengan basis komoditas di Kabupaten Maros dari sektor pertanian yakni padi dan kedelai dengan nilai LQ 1.14 dan 1.17 lebih dari angka 1.

4.2. Rumusan Hasil Penelitian

Berdasarkan rangkaian hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh rumusan penelitian terkait konsep ketahanan pangan Kota Makassar dan jalur distribusi pangan ke Kota Makassar dari titik awal Kabupaten-Kabupaten Pemasok.

1. Konsep Ketahanan Pangan Kota Makassar

Secara studi kelayakan, konsep ketahanan pangan disubstitusikan dengan pilar pengembangan wilayah pangan yang terdiri dari ketersediaan infrastruktur penunjang ketahanan pangan semisal pasar dan gudang, kajian teknis tanah dan agroklimat yang mendukung untuk produksi pertanian, teknologi pengolahan pangan, dan aspek sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi objek pembangunan. Formulasi dari konsep tersebut dilustrasikan secara sederhana pada Gambar 3 dan 4 sebagai berikut.



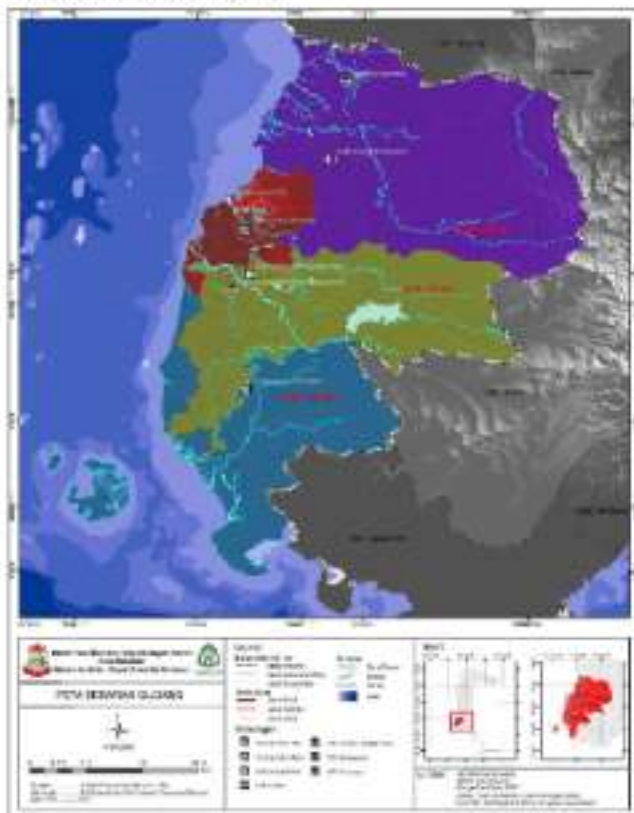
Gambar 3. Konsep Pengembangan Wilayah Pangan
Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2020



Gambar 4. Konsep Pembangunan Ketahanan Pangan Menuju Keberlanjutan Pembangunan di Kota Metropolitan
Sumber: Hasil Analisis Tim Tahun 2020

2. Jalur Distribusi Pangan Ke Kota Makassar

Jalur distribusi pangan Kabupaten Pemasok, dalam hal ini adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa ke Kota Makassar diformulasikan sesuai dengan data sebaran gudang maupun sebaran pasar secara eksisting.



Gambar 4. Sebaran Gudang Kawasan Perkotaan Mamminasata

Gambar 4 menunjukkan bahwa terdapat 7 titik gudang bulog di Kawasan Perkotaan Mamminasata, yaitu Gudang Bulog Tallo, Maros, Sungguminasa, Palakka, Sungguminasa, Batangase, dan Palantikang.



Gambar 5. Sebaran Pasar Distribusi Pangan di Kota Makassar

a. Jalur Distribusi Pangan Kawasan Mamminasata

Penetapan Mamminasata sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dengan Kota Makassar sebagai kota inti dan ditopang oleh tiga kabupaten lainnya yakni Maros, Gowa dan Takalar sebagai kota penyangga.

Ternasuk kebutuhan pangan Kota Makassar yang sebagian disuplai dari ketiga kota penyangga. Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan Kabupaten Maros menyuplai pangan berupa padi dan kedelai, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar menyuplai pangan berupa bawang merah menuju kota makassar seperti yang ditunjukkan dalam peta jalur distribusi pangan tersebut. Pada penelitian ini hanya melihat suplai menuju Kota Makassar yang selanjutnya dilakukan pemetaan jalur distribusi pangan dalam lingkup Kota Makassar.



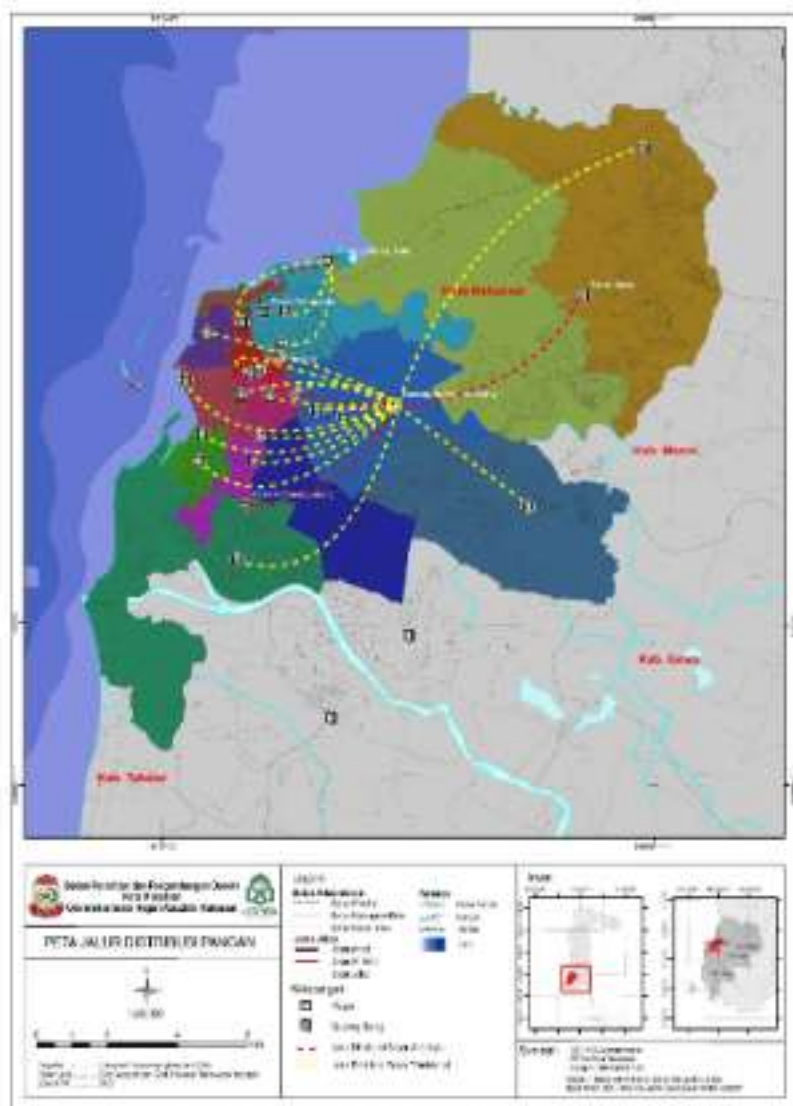
Gambar 6. Jalur Distribusi Pangan di Kawasan Perkotaan Mamminasata

b. Jalur Distribusi Pangan Per Kecamatan di Kota Makassar

Proses pendistribusian pangan dari produsen ke konsumen tentu saja pasar menjadi media utama. PD Pasar Makassar Raya menetapkan 22 pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan di Kota Makassar seperti yang ditunjukkan gambar 5. Pemerintah Kota Makassar juga menetapkan 4 pasar yang dijadikan sebagai pemantauan distribusi pangan strategis, yaitu Pasar Pannampu, Pasar Terong, Pasar Pa'baeng-baeng dan Pasar daya. Selain pasar, terdapat Gudang yang menjadi tempat penyimpanan sementara pangan sebelum didistribusikan ke pasar-pasar.

Beras sebagai pangan pertanian utama ditampung pada 2 gudang besar di Kota Makassar yakni GBB Panaikang I yang memiliki daya tampung hingga 21 ribu ton beras dan juga Gudang Bulog Tallo yang memiliki daya tampung lebih kecil dengan 5 ribu ton.

Pendistribusian kemudian dilakukan ke pasar-pasar tradisional dari Gudang penyimpanan sementara. Dengan daya tampung yang besar, GBB Panaikang I mensuplai pangan ke 18 pasar di Kota Makassar dan Gudang Bulog Tallo yang lebih kecil mensuplai 4 pasar dengan 1 pemantauan pasar strategis yakni pasar terong, sedangkan GBB Panaikang I mensuplai 3 pasar pemantauan distribusi pangan strategis yakni Pasar Pa'baeng-baeng, Pasar pannampu dan pasar daya. Hal tersebut dapat dilihat pada peta jalur distribusi pangan Kota Makassar pada gambar 7.



3. Strategi Supply Chain dan Logistik Pangan Daerah Sekitar Sebagai Supplier Pangan Utama ke Kota Makassar

Strategi dalam Supply Chain dan Logistik Pangan Daerah Sekitar Sebagai Supplier Pangan Utama ke Kota Makassar dirumuskan berdasarkan hasil Analisis SWOT yang telah dilakukan sebagai berikut.

a. Kekuatan (Strength)

Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh Daerah Supplier adalah sebagai berikut.

- 1) Memiliki basis sektor ekonomi bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan
- 2) Memiliki banyak memiliki lahan pertanian hidrologis (bukan tanah hujan)
- 3) Memiliki gudang penampungan hasil pertanian
- 4) Biaya pemasaran pada kota ini masih terjangkau
- 5) Aksesibilitas menuju kota ini lancar
- 6) Ketersediaan sumberdaya manusia mencukupi

Tabel 19 Faktor Kekuatan (Strengths) di Daerah Supplier

No	Faktor Strategi Internal STRENGTHS (S) (Kekuatan)	Bobot	Ranking	Skor Pembobotan
	Memiliki basis sektor ekonomi bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan	15	3	45
	Memiliki lahan pertanian hidrologis (bukan tanah hujan)	20	4	80
	Memiliki gudang penampungan hasil pertanian	20	3	60
	Biaya pemasaran pada kota ini masih terjangkau	15	4	60
	Aksesibilitas menuju kota ini lancar	20	4	80
	Ketersediaan sumberdaya manusia mencukupi	10	4	40
Total Skor Pembobotan		100		365

Sumber: Hasil Analisis 2020

b. Kelemahan (*Weakness*)

Faktor-faktor kelemahan yang dimiliki oleh Daerah Supplier adalah sebagai berikut.

- a) Kapasitas daya tampung gudang yang terbatas
- b) Ketersediaan industri pengolahan masih kurang
- c) Ketersediaan industri pengolahan pangan yang belum menyentuh teknologi

Tabel 20 Faktor Kelemahan di Daerah Supplier

No	Faktor Strategi Internal WEAKNESS (W) (Kelemahan)	Bobot	Ranking	Skor Pembobotan
1	Kapasitas daya tampung gudang yang terbatas	35	3	105
2	Ketersediaan industri pengolahan masih kurang	35	3	105
3	Ketersediaan industri pengolahan pangan yang belum menyentuh teknologi	30	3	90
Total Skor Pembobotan		100		300

Sumber: Hasil Analisis 2020

c. Peluang (*Opportunity*)

Faktor-faktor peluang yang dimiliki Daerah Supplier adalah sebagai berikut.

- a) Kerjasama antar wilayah untuk mengembangkan potensi pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan
- b) Permintaan terhadap kebutuhan pangan dari Kota Makassar mengalami peningkatan
- c) Perkembangan sektor pertanian akan menciptakan peluang kesempatan kerja dan tambahan lapangan usaha bagi masyarakat
- d) Pengembangan kawasan pertanian berbasis teknologi
- e) Posisi Mamminasata sebagai pintu gerbang Indonesia Timur memungkinkan distribusi pangan yang maksimal

Tabel 21 Faktor Peluang di Daerah Supplier

No	Faktor Strategi Eksternal <i>Opportunity (O)</i> (Peluang)	Bobot	Ranking	Skor Pembobotan
1	Kerjasama antar wilayah untuk mengembangkan potensi pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan	20	4	80
2	Permintaan terhadap kebutuhan pangan dan Kota Makassar mengalami peningkatan	20	4	80
3	Perkembangan sektor pertanian akan menciptakan peluang kesempatan kerja dan tambahan lapangan usaha bagi masyarakat	20	4	80
4	Pengembangan kawasan pertanian berbasis teknologi	20	4	80
5	Posisi Mamminasata sebagai pintu gerbang Indonesia Timur memungkinkan distribusi pangan yang maksimal	20	4	80
Total Skor Pembobotan		100		400

Sumber: Hasil Analisis 2020

d. Ancaman (Threats)

Faktor-faktor ancaman yang dimiliki Daerah Supplier adalah sebagai berikut.

- Fungsi kabupaten sebagai bagian dari kesatuan wilayah metropolitan Mamminasata dapat mengancam eksistensi lahan pertanian
- Pengelolaan SDA belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan
- Meningkatnya kegiatan pembangunan menjadikan penurunan kualitas produktivitas lahan pertanian

Tabel 22 Faktor Ancaman di Daerah Supplier

No	Faktor Strategi Eksternal <i>Threats (T)</i> (Ancaman)	Bobot	Ranking	Skor Pembobotan
1	Fungsi kabupaten sebagai bagian dari kesatuan wilayah metropolitan Mamminasata dapat mengancam eksistensi lahan pertanian	35	4	140

No	Faktor Strategi Eksternal Threats (T) (Ancaman)	Bobot	Ranking	Skor Pembobotan
2	Pengelolaan SDA belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan	30	3	90
3	Meningkatnya kegiatan pembangunan menjadikan penurunan kualitas lahan pertanian	35	4	140
Total Skor Pembobotan		100		370

Sumber: Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil pembobotan pada tabel 21 dan tabel 22 diketahui bahwa skor untuk faktor peluang (O) adalah 400 dan faktor ancaman (T) adalah 370 sehingga nilai untuk faktor eksternal atau EFAS (Peluang dan Ancaman) adalah $400 - 370 = (+) 30$. Hal ini menunjukkan bahwa peluang dalam memperbaiki Daerah Supplier cukup tinggi dibandingkan ancaman yang akan di alami saat ini. Adapun skor IFAS (Kekuatan – Kelemahan) pada tabel 19 dan tabel 20 yaitu $365 - 300 = (+) 65$. Hal ini berarti kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh Daerah Supplier masih kuat jika dibandingkan dengan kelemahan yang dialami saat ini.

Untuk mengetahui letak kuadran strategi yang dianggap memiliki prioritas yang tinggi untuk segera dilaksanakan digunakan formulasi sumbu X dan Y, dimana sumbu X adalah EFAS (Peluang dan Ancaman) dan sumbu Y adalah IFAS (Kekuatan dan Kelemahan) yang dinyatakan dalam nilai sesuai hasil skoring.

- (IFAS) = Kekuatan – Kelemahan = $365 - 300 = + 65$ (y)
- (EFAS) = Peluang – Ancaman = $400 - 370 = + 30$ (x)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan skor IFAS (Kekuatan dan Kelemahan) yaitu $365 - 300 = (+) 65$, sedangkan skor EFAS (Peluang dan Ancaman) yaitu $400 - 370 = (+) 30$. Maka nilai IFAS – EFAS menunjukkan nilai positif (+) dan nilai positif (+) sehingga strategi untuk rekomendasi untuk optimalisasi Daerah Supplier berada di antara strategi Peluang dan Kekuatan (S-O) yang berada pada Kuadran I. Selengkapnya disajikan pada Gambar6 berikut.



Gambar 8 Grafik Analisis SWOT

4.3. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dan rumusan penelitian yang dilakukan, maka implikasi hasil penelitian ini adalah memberikan informasi jalur efektif dalam distribusi pangan di Kota Makassar yang berasal dari kabupaten-kabupaten pemasok dalam lingkup Kota Metropolitan Mamminasata. Hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti adalah keperluan tambahan penopang pangan dari wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun untuk lahan-lahan kosong yang hari ini masih tersedia di beberapa titik di Kota Makassar, dapat dijadikan sebagai kawasan pertanian perkotaan dengan basis urban farming.

Dinamika pembangunan Kota Makassar yang sangat cepat dan revolusioner berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Increasing level of development has often been attributed to urbanization. Rapid urbanisation, mainly in terms of high population growth, continues to pose substantial threats to the sustainability of cities (Kaur and Luthra, 2018; Ayambire et al., 2019). Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai macam masalah antara lain; fisik lingkungan,

sosial, dan ekonomi yang menjadi embrio terbentuknya permukiman kumuh. *Slums form and grow in many different parts of the world for many different reasons. Some causes include rapid rural-to-urban migration, economic stagnation and depression, high unemployment, poverty, informal economy, poor planning, politics, natural disasters and social conflicts* (Ragheba et al., 2016). Salah satu wilayah yang dapat dijadikan pilot project untuk pengembangan urban farming adalah Kelurahan Tanjung Merdeka.

Hal yang kemudian menjadi latar belakang wilayah ini diangkat menjadi salah satu usulan *pilot project* karena wilayah ini memiliki lahan kosong untuk menjadi tempat garapan dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang masih perlu didampingi dalam diberdayakan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Secara geografis, Kelurahan Tanjung Merdeka adalah daerah pesisir pantai dengan kondisi tofografi yang relatif datar dan harga lahan yang cukup rendah. Perubahan karakteristik pesisir pantai akibat kegiatan pembangunan kawasan kota baru memiliki dampak secara langsung terhadap sosial ekonomi komunitas lokal.



Gambar 8. Kelurahan Tanjung Merdeka Kota Makassar

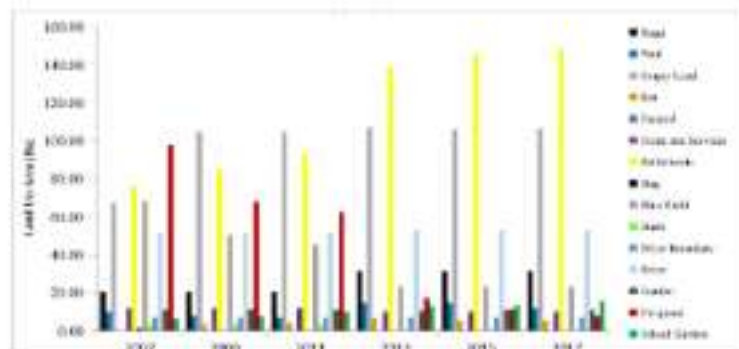
Peningkatan jumlah penduduk Kelurahan Tanjung Merdeka selama lima tahun terakhir yaitu: (i) Tahun 2014 jumlah penduduk sebesar 10.540 jiwa, (ii) tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 10.764 jiwa, (iii) tahun 2016 jumlah penduduk meningkat menjadi 10.981 jiwa, (iv) tahun 2017 meningkat menjadi 11.200 jiwa, dan (v) tahun 2018 meningkat menjadi 11.414 jiwa (BPS, 2018). Fakta tersebut memberi gambaran bahwa penduduk di Kelurahan Tanjung Merdeka mengalami peningkatan yang cukup signifikan berjalan sejajar dengan peningkatan intensitas pembangunan ke arah pertumbuhan ekonomi. Perubahan penggunaan lahan pada Kelurahan Tanjung Merdeka, pada Gambar 9 berikut.



Penggunaan Lahan Tahun 2007

Penggunaan Lahan Tahun 2017

Gambar 10. Perubahan Penggunaan Lahan di Kelurahan Tanjung



Gambar 11. Perubahan Penggunaan Lahan Tahun 2007-2017 di Kel. Tanjung Merdeka

Gambar 11 menunjukkan perubahan penggunaan lahan selama sepuluh tahun terakhir pada Kelurahan Tanjung Merdeka dan permukiman merupakan pemanfaatan ruang yang dominan dengan luas wilayah 148,70 Ha atau 34,33%. Perkembangan permukiman baru berasosiasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk dan diidentifikasi akan mengancam keberlangsungan tenaga kerja lokal dan keberlanjutan lingkungan kota. Fakta lapangan yang ditemukan memberi gambaran bahwa keberadaan masyarakat miskin yang berlokasi pada permukiman kumuh memiliki kecenderungan untuk membangun relasi antarindividu sebagai kesatuan komunitas dan relasi ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dalam satu kesatuan unit lingkungan. *The cultural approach, which is more collaborative and participatory, draws upon valuable cultural capital and local connections to build social networks, implementing the ideas of the residents and preserving a traditional way of life* (Chun, et al., 2012).



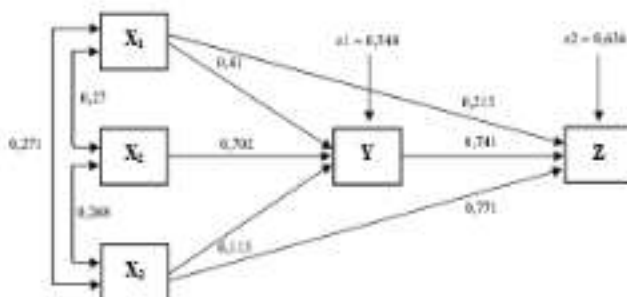
Gambar 12. Kondisi Permukiman Masyarakat Lokal di Kel. Tanjung Merdeka

Pada kasus Kelurahan Tanjung Merdeka Kota Makassar dengan mengacu pada fakta lapangan memberi gambaran bahwa masyarakat lokal Kelurahan Tanjung Merdeka cenderung termarginalkan dan kondisi permukimannya termasuk dalam kategori permukiman kumuh. Permasalahan masalah permukiman kumuh yang terlihat pada kasus

Tanjung Merdeka ini cenderung bersifat kompleks dan dari sisi kemampuan masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan pangannya belum memenuhi standar. Kami berpendangan bahwa salah satu solusi dalam penanganan permukiman kumuh adalah implementasi konsep urban farming berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. *The concept of urban farming has developed, taking various perspectives over time from specific purposes to consider various meanings and activities for the good of society. Urban farming is frequently promoted as a solution to food deserts by providing a local source of fresh produce* (Haddad and Danwih, 2019; Poulsen, 2016). Tawaran solusi urban farming digagas untuk mengatasi permukiman kumuh pada Kelurahan Tanjung Merdeka secara tuntas dengan cara mendorong peningkatan peran partisipasi komunitas lokal yang teragingsikan akibat pembangunan kawasan kota baru dan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka juga.

Fakta lapangan yang ditemukan menunjukkan bahwa marginalisasi komunitas lokal akibat ketidakmampuan dalam proses adaptasi terhadap fungsi-fungsi yang ruang berkembang. Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi dan pembangunan permukiman formal serta keberadaan penduduk pendatang berdampak secara langsung terhadap akses ekonomi komunitas lokal yang bersifat formal. Fakta tersebut setelah dikonfirmasi di lapangan memberi gambaran bahwa ketidakmampuan akses ekonomi komunitas lokal akibat keterbatasan kemampuan, keterampilan, dan latar belakang pendidikan yang terbatas untuk dapat terserap pada lapangan kerja yang bersifat formal.

Konsep pemberdayaan ekonomi yang diorientasikan pada komunitas lokal melalui proses pendampingan dalam implementasi urban farming melalui pola hidroponik akan mendorong peningkatan produktifitas, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah secara ekonomi tanpa membutuhkan kerampilan dan keahlian khusus serta latar belakang pendidikan yang cukup memadai. Hasil analisis jalur konsep urban farming berbasis pemberdayaan ekonomi pada Gambar 12 berikut.



Gambar 13 Hubungan Antara Urban Farming Terhadap Pembedayaan Ekonomi Masyarakat

Gambar 13 menunjukkan beberapa hasil interpretasi yang dapat diajukan terhadap hasil analisis tersebut yaitu: (i) Hubungan atau korelasi antara partisipasi masyarakat terhadap potensi angkatan kerja sebesar 0,27, (ii) Hubungan atau korelasi antara partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh sebesar 0,271, (iii) Hubungan atau korelasi antara potensi angkatan kerja terhadap penanganan permukiman kumuh sebesar 0,268. Selanjutnya, pengaruh langsung urban farming terhadap penanganan permukiman kumuh yang dapat dijelaskan yaitu: (i) pengaruh langsung partisipasi masyarakat terhadap urban farming $(0,41)^2 = 0,1681 = 16,81 \%$, (ii) pengaruh langsung potensi angkatan kerja terhadap urban farming $(0,702)^2 = 0,4928 = 49,28 \%$, (iii) pengaruh langsung penanganan permukiman kumuh terhadap urban farming $(0,113)^2 = 0,0128 = 1,28 \%$.

Selanjutnya pengaruh tidak langsung penanganan permukiman kumuh berbasis urban farming yaitu: (i) partisipasi masyarakat melalui urban farming terhadap produktivitas ekonomi $(0,41) (0,27) (0,702) = 0,0777 = 7,77\%$, (ii) potensi angkatan kerja melalui urban farming terhadap partisipasi masyarakat $(0,702) (0,27) (0,41) = 0,0777 = 7,77 \%$, (iii) partisipasi masyarakat melalui penanganan permukiman kumuh terhadap urban farming $(0,41) (0,271) (0,113) = 0,0126 = 1,26\%$, (iv) urban farming

melalui penanganan pemukiman kumuh terhadap partisipasi masyarakat = $(0,113) (0,271) (0,41) = 0,0126 = 1,26\%$, (v) potensi angkatan kerja melalui penanganan pemukiman kumuh terhadap urban farming = $(0,702) (0,268) (0,113) = 0,0213 = 2,13\%$, (vi) penanganan pemukiman kumuh melalui potensi angkatan kerja terhadap urban farming = $(0,113) (0,268) (0,702) = 0,0213 = 2,13\%$. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh total sebesar $(0,1681 + 0,4928 + 0,0126) + (0,0777 + 0,0777) + (0,0126 + 0,0126) + (0,0213 + 0,0213) = 0,8909$ atau $89,09\%$. Sisa pengaruh atau residu (pengaruh variable bebas lain yang tidak diteliti terhadap urban farming) adalah sebesar $1 - 0,8909 = 0,1031 = 10,31\%$. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijustifikasi bahwa urban farming memberikan pengaruh positif terhadap produktivitas ekonomi dalam penanganan pemukiman kumuh. Adapun terkait pengaruh langsung urban farming terhadap produktivitas ekonomi sebesar $(0,741)^2 = 0,5491 = 54,91\%$. Sisa pengaruh atau residu (pengaruh variable lain terhadap produktivitas ekonomi) = $1 - 0,5491 = 0,4509 = 45,09\%$. Jadi secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa pengaruh X terhadap Y sebesar $89,09\%$ dan pengaruh Y terhadap Z sebesar $54,91\%$. Pola gambar berikut disajikan ilustrasi desain pertanian hidropnik yang dapat dikembangkan di Kelurahan Tanjung Merdeka.



Gambar 14. Ilustrasi Desain Urban Farming Dengan Pola Hidropnik



Gambar 15. Ilustrasi Desain Urban Farming Dengan Pola Aquaponik

Gambar 15 menunjukkan pola kegiatan urban farming yang dikembangkan pada Kelurahan Tanjung Merdeka diorientasikan pada pembuatan hidroponik dan aquaponik. Rencana material yang digunakan dalam pembuatan hidroponik adalah jenis pipa PVC dengan diameter 2 1/2. Penyediaan aquaponik yang dikembangkan memanfaatkan potensi aliran Sungai Je'neberang dan dipadukan dengan mengembangkan budidaya perikanan dengan sistem keramba jaring apung. Dengan demikian pola aquaponik juga dijadikan tawaran alternatif dalam pengembangan budidaya ikan berbasis peningkatan produktivitas usaha ekonomi masyarakat.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan pertumbuhan struktur perekonomian di Kawasan Metropolitan Mamminasata berada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Makassar sebagai kota inti mampu menjadi kota yang memiliki ketahanan pangan karena daerah supplyernya merupakan daerah yang potensial memasok bahan pangan.
2. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa Kabupaten Maros memiliki potensi ekspor pangan berupa padi dan kedelai. Sementara untuk Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar menyuplai pangan berupa bawang merah menuju Kota Makassar.
3. Pola distribusi komoditas unggulan di Kota Makassar dilakukan pertimbangan aspek sebaran gudang, sebaran pasar, dan titik sentral pelayanan di masing-masing kecamatan.
4. Strategi *supply chain* dan logistik produksi pangan daerah sekitar sebagai *supplier* pangan utama ke Kota Makassar, yaitu (i) Rehabilitasi sarana perdagangan yang tersedia; (ii) Meningkatkan antar wilayah dalam pengembangan potensi pertanian yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam lingkup sistem metropolitan Mamminasata; (iii) Pendampingan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan produksi pertanian; (iv) Optimalisasi fungsi pasar sebagai pusat pemasaran produk hasil pertanian; dan (v) Memberikan jasa pelayanan online dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
5. Rumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam optimalisasi pasar domestik, yaitu (i) menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial; (ii) meningkatkan belanja pemerintah sebagai sinyal positif bagi dunia usaha agar dapat menggerakkan kegiatan

ekonomi dalam negeri; (ii) meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produksi dan industry pengolahan bahan pangan; (iv) membuat akun start up untuk memudahkan proses transaksi bahan pangan; dan (v) mengencaskan promosi melalui media.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah berupa perlunya penyediaan data komoditas pangan yang lebih lengkap dan akurat oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Sulsel. 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Sulsel. Makassar
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Tamalate dalam Angka 2018. BPS Kota Makassar
- Chun Zhang, et al., 2012. *Involving the Community in Inner City Renewal: A Case Study of Nantugu in Beijing*. *Journal of Urban Management*. ELSEVIER. Volume. 1. Issue 2. 2012. pp. 53-71. [https://doi.org/10.1016/S2220-5858\(18\)30060-8](https://doi.org/10.1016/S2220-5858(18)30060-8)
- Chopra, S dan Meindl, P. (2004). "Supply Chain Management". New Jersey: Pearson Education
- Haddad, Rema and Darwish, Zela. 2019. *Urban Farming and Its Role in Enhancing the Sustainability of Cities*. Sustainable Cities and Communities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. SPRINGER. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71081-7_41-1
- Kaur, Ritu Raj and Luthra, Ashwani. 2018. *Population Growth, Urbanization and Electricity – Challenges and Initiatives in the State of Punjab, India*. *Energy Strategy Reviews*. ELSEVIER. Vol 21.pp50-61. DOI: 10.1016/j.esr.2018.04.005
- Lewi, David Simchi. 2000. *Designing And Managing The Supply Chain*. Mc Graw - Hill Companies Inc. United States of America.
- Osterwalder. 2008. Example of features per business model elements. Area Ex. Vs. Value proposition Low cost/value High Cost/value.
- Ragheb, Ghada., El Shimy, Hisham , and Ragheb, Amany. 2016. Land for Poor: Towards Sustainable Master Plan for Sensitive Redevelopment of Slums. *Procedia – Sosial and Behavioral Sciences*. Vol 216 pp 417-427. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.12.056
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung
- Syarifudin L. 2003. Studi Pemilihan Subsektor Jasa Unggulan Dalam Rangka Mendukung Kota Bandung Sebagai Kota Jasa. *Infomatek* volume 5 Nomor 3 September 2003. Bandung

- Warpani S. 1984. Analisis Kota dan Daerah. ITB, Bandung.
- Widodo. 2019. Metode Penelitian Populer & Praktis. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- You, Zhen., Yang, Hanbing., and Fu Meichen. 2018. *Settlement Intention Characteristics and Determinants in Floating Population in Chinese Border Cities*. *Sustainable Cities and Society*. ELSEVIER. Vol.39, pp.475-489. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.02.021>